

RADIKALISME POLITIK KEAGAMAAN DI JAWA TENGAH

POLITICS RADICALISM OF RELIGION IN CENTRAL JAVA

Mursid Zuhri

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pemuda 127 – 133 Semarang

Email: zmursid_2010@yahoo.co.id

Diterima: 10 Februari 2017, Direvisi: 13 April 2017, Disetujui: 20 Mei 2017

ABSTRAK

Munculnya pandangan yang diikuti gerakan untuk melakukan perubahan ideologi negara yaitu negara Pancasila menjadi negara Islamis dalam satu segi, dan realitas penduduk Indonesia yang pluralis dalam segi yang lain, seringkali menghadirkan kecemasan dan kekhawatiran munculnya konflik-konflik baik yang bersifat latensial maupun konflik-konflik yang ekspresif di berbagai daerah di Jawa Tengah. Masalah yang menjadi fokus kajian pada intinya ialah bagaimana ciri-ciri dari pandangan yang diikuti dengan gerakan-gerakan radikalisme itu, apa latar belakangnya, di mana lahan-lahan subur tumbuhnya radikalisme itu, serta bagaimana memperlakukan dan mengantisipasi kemunculan gerakan radikalisme dimaksud. Untuk tujuan memahami masalah-masalah tersebut, dilakukan studi kualitatif terhadap berbagai pandangan dan gerakan yang mengarahkan pada ciri-ciri radikalisme terhadap sejumlah informan di Surakarta, Wonosobo, Banyumas, Tegal, Pekalongan, dan Jepara. Dari hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa latar belakang kemunculan gerakan radikalisme ini adalah karena teks uci keagamaan (Al Qur'an dan Hadits) bersifat terbuka, bisa ditafsirkan secara literal dan kontekstual, sehingga memunculkan berbagai kelompok keagamaan (moderat, radikal, fundamentalis dsb.) yang pada akhirnya melahirkan in group dan out group feeling dan evaluasi sepihak. Sering terjadi overlapping antara kepentingan agama dan kepentingan komunitas keagamaan. Kenyataan menunjukkan bahwa agama mampu membangkitkan emosi yang paling dalam sering dijadikan sebagai alat mobilisasi sosial. Kekerasan dengan kemasakan agama menjadi sangat mungkin. Model-model perjuangan yang dipilih terkait dengan pencitraan keagamaan, dominasi budaya masyarakat, kekuatan dukungan sosial dan peran media. Upaya pencegahan atau jalan keluar yang bisa ditempuh dengan cara: kebijakan-kebijakan pemerintah hendaknya berpihak kepada kaum lemah, sekaligus perlakuan yang adil bagi setiap warga di muka hukum, pemerintah harus mulai terbuka dan membuka diri untuk dapat terjadinya komunikasi guna memecahkan persoalan kebangsaan secara partisipatif, para tokoh-tokoh agama harus mulai memberi contoh yang baik dan konsisten, perlunya penyadaran kepada seluruh komponen bahwa Indonesia adalah negara yang pluralistik.

Kata kunci: radikalisme, agama, politik

ABSTRACT

The emergence of the view that followed the movement to change the state ideology of the Pancasila state into an Islamist state in one sense, and the reality of pluralist Indonesian population in other respects, often presents anxiety and concern about the emergence of both latent and expressive conflicts in various regions of Central Java. The subject matter of the study is essentially how the characteristics of the views followed by the radical movements, what is the background, in which the fertile lands of the growth of radicalism, and how to treat and anticipate the emergence of the radical movement. For the purpose of understanding these problems, qualitative studies were conducted on various views and movements that led to the characteristics of radicalism towards a number of informants in Surakarta, Wonosobo, Banyumas, Tegal, Pekalongan and Jepara. From the field findings, the background of the emergence of this radicalist movement is that religious sacred texts (Al Qur'an and Hadith) are open, literal and contextual, so as to raise various religious groups (moderate, radical, fundamentalist, etc.) which ultimately giving birth in group and out feeling group and unilateral evaluation. There is often an overlap between religious interests and the interests of religious communities. The fact shows that religion is capable of evoking the deepest emotions is often used as a tool of social mobilization. Violence with religious packaging becomes very possible. Selected fighting models are related to religious imagery, cultural community domination, the strength of social support and the role of the media. Efforts to prevent or exit that can be taken by: government policies should side with the weak, as well as fair treatment for every citizen before the law, the government must begin to open and open up for communication to solve national problems in a participatory, religious leaders must begin to set a good and consistent example, the need for awareness to all components that Indonesia is a pluralistic country.

Keywords: radicalism, religion, politics

PENDAHULUAN

Ada tiga kategori paradigmatik untuk menjelaskan bagaimana umat memaknai agama dan peran umat beragama di dalam kehidupan sosio politik. **Pertama**, kelompok religio politik yang mengikuti pola paradigma substantif. **Kedua**, kelompok yang dalam hal-hal tertentu memiliki pandangan yang sekuleristik. **Ketiga**, kelompok yang secara formalistik bersesuaian dengan faham fundamentalis, terutama ketika dihadapkan kepadanya tentang relasi antara agama dan negara. Pengertian **radikalisme** itu sendiri menurut definisi yang diajukan oleh *The American College Dictionary* (1961: 998) adalah “prinsip-prinsip atau pratik-praktik yang dilakukan secara radikal yang merupakan kata lain dari ekstremisme” (Effendi & Sirry, 2003: 105) militanisme, atau fundamentalisme (Bukhori, 1986: 57;

J.G. Jansen:1986; 1979 dan Ruthven, 1984; dalam Priyono, 2003:15). Istilah-istilah itu digunakan dalam banyak pengertian yang berbeda-beda, tetapi yang jelas istilah-istilah tersebut tidak terbatas tertuju pada Islam, termasuk juga tidak terbatas pada kegiatan agama, karena banyak contoh tentang fundalisme dalam beberapa gerakan politik yang mempunyai ideologi-ideologi sekuler, jika bukan ateis (Burrel, 1995) yang memiliki watak radikal.

Konsep radikalisme politik keagamaan dalam konteks Indonesia adalah menempatkan sifat radikalisme dalam kemajemukan, sebagaimana kemajemukan atau keragaman keagamaan yang dipeluk oleh warga masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, dalam masyarakat-masyarakat atau bangsa-bangsa yang homogen dalam keagamaan seperti negara Arab Saudi

misalnya, maka pernyataan bahwa negara adalah harus berazas Islam adalah tidak relevan untuk dibicarakan dalam konteks negara Arab Saudi. Tapi untuk Indonesia, wacana bahkan tuntutan seperti itu menjadi krusial justru karena masyarakat Indonesia secara *socio-religion* adalah heterogen. Masalahnya adalah keharusan untuk mendasarkan pada azas Islam atau memperlakukan syariat Islam bagi semua warga Indonesia, bahkan mencita-citakan Indonesia sebagai negara Islam secara implisit terkait dengan memposisikan agama dalam kaitannya dengan kekuasaan dan penguasaan, serta aturan dan pengaturan.

Bisa jadi dorongan-dorongan maupun tuntutan-tuntutan dari sejumlah ormas Islam maupun orsospol itu mempertimbangkan dua variabel penting yang diberlakukan, baik secara sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama. Variabel *pertama* adalah nilai kebenaran (*the truth value*) agama (dalam hal ini Islam) dan variabel *kedua* adalah mayoritas pemeluk agama (dalam hal ini Islam).

Pertanyaan untuk menguji kedua variabel itu adalah kebutuhan menjadikan Islam sebagai negara atau negara harus didasarkan atas syariat Islam. Apakah karena nilai-nilai Islam itu diyakini dapat berlaku dan karenanya bisa dilakukan kepada siapa saja, baik mereka itu warga negara Indonesia yang beragama Islam atau bukan beragama Islam. Apabila dikatakan bahwa “nilai ajaran Islam” bisa berlaku kepada siapa saja dan karena itu perlu diberlakukan kepada semua orang, untuk mereka yang muslim ataupun yang bukan muslim, mungkin pada tataran teologis-subyektif adalah wajar dan dibenarkan, dan karena itu bisa dimengerti serta diterima oleh orang Islam. Tetapi apakah orang-orang yang di luar pemeluk Islam, di mana mereka juga mempunyai hak yang sama dengan kita sebagai warga

negara akan berfikir dan berkeyakinan yang sama dengan umat Islam sendiri? Jika tidak menerima, lalu apakah ha-hak mereka kita abaikan saja. Pada variabel kedua, yaitu soal mayoritas jumlah pemeluk apakah tuntutan diberlakukannya syariah Islam karena mayoritas warga Indonesia beragama Islam. Jika demikian, bukankah ini artinya Islam ditarik masuk ke dalam konsep dominasi “mayoritas” atas “minoritas”? Bukankah desakan seperti itu adalah desakan yang datang dari manusia “pilitikus” bukan sebagai “manusia relegius”? Apakah jika “diyakini”, lalu apakah tepat jika persoalan agama diatur dan ditentukan oleh penganutnya atas landasan politik kekuasaan? atau terlepas dari itu semua, apakah ada jaminan kalau “syariat islam” harus diberlakukan sebagai hukum negara dalam masyarakat yang memiliki heterogenitas agama? Jaminan-jaminan apa yang bisa dipakai mengukuhkan tuntutan seperti itu. Dari sejumlah pertanyaan semacam di atas, kajian tentang radikalisme politik keagamaan dalam konteks Indonesia menjadi semakin terasa penting dan mendasar.

Masalah yang menjadi fokus penelitian adalah: 1) Bagaimana pencitraan keagamaan ormas-ormas/orsospol-orsospol? 2) Bagaimanakah karakteristik radikalitas politik keagamaan di Jawa Tengah? 3) Dalam situasi apa kecenderungan radikalisme itu tumbuh dan berkembang? 4) upaya-upaya apa yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi kemunculan gerakan radikal yang destruktif pada kegiatan religio-politik?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah; 1) memahami bagaimana ormas-ormas keagamaan dan orsospol mencitrakan agama, 2) memahami karakteristik mengenai pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan tindakan-tindakan radikal yang ditarik masuk ke dalam ranah agama dan politik

di Jawa Tengah, 3) memahami lahan-lahan subur pertumbuhan dan perkembangan radikalisme di Jawa Tengah; serta 4) memberikan alternatif antisipasi dan pemecahan terhadap pertumbuhan gerakan radikal yang sifatnya destruktif yang diatasnamakan agama.

METODE PENELITIAN

Landasan berfikir yang digunakan adalah bukan kepada gejala-gejala sosial-keagamaan sebagai bentuk-bentuk yang nampak di permukaan tetapi lebih pada makna-makna dalam suatu gejala sosial – keagamaan, seorang peneliti harus bisa menempatkan dirinya dalam peranannya sebagai para pelaku yang ditelitinya untuk dapat mencapai tingkat pemahaman yang sempurna mengenai makna-makna yang terwujud dalam gejala-gejala sosial-keagamaan yang diamatinya (Suparlan, 1996). Cara mengambil posisi seperti ini, dikenal dengan perspektif emik. Dalam perspektif etik, peneliti memposisikan diri sebagai orang-luar, sedang dalam perspektif emik, peneliti menempatkan diri sebagai orang dalam.

Metode penelitian kualitatif yang digunakan di dalam penelitian ini ditekankan pada wawancara berpedoman disertai dengan metode pengamatan terhadap sejumlah kegiatan yang relevan dan yang terjadi saat peneliti berada di lapangan. Di luar itu juga dilakukan penyimakan atau pengkajian terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh ormas atau orsospol yang dipelajari.

Kelompok sasaran atau kelompok kajian yang menjadi dan dijadikan sumber informasi terdiri dari dua kategori. Kategori *pertama* adalah (pengurus dan warga) dari institusi keagamaan yang menunjukkan kecenderungan pada semangat radikal atau fundamental, dan institusi politik (partai politik) yang secara resmi berazaskan Islam, bukan Pancasila. Kategori *kedua* adalah institusi keagamaan

yang bercorak moderat dan adaptif terhadap kemajemukan ideologi, serta institusi politik yang dilahirkan oleh kelompok muslim tetapi berazaskan Pancasila serta bersifat terbuka.

Penelitian ini dilakukan di tiga daerah, yang masing-masing daerah ini dilihat dari areal budayanya mewakili masyarakat Jawa Negarigung, masyarakat Jawa Mancanegari, dan masyarakat Jawa Pesisiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Radikalisme yang bergerak dari dan gerakan atas nama agama, dalam kenyataannya mempunyai pola-polanya sendiri. Pola-pola dari radikalisme tadi, rupanya menjadi semacam “*saling tarik-ulur*” dengan empat faktor (dalam bahasa kuantitatif disebut variabel) yaitu: pencitraan keagamaan (*the religious imaging*); dominasi budaya masyarakat (*the cultural domination*); kekuatan dukungan sosial (*the power of social support*); dan peran-peran media (*the role of media*). Keempat faktor itu bisa hadir secara bersama-sama, tetapi bisa juga hadir secara terpisah.

Pencitraan keagamaan beroperasi secara timbal balik antara pemahaman keagamaan personal dengan ormas keagamaan dan atau politik yang diikuti. Ini artinya, “apa yang dipahami sebagai agama dan kewajiban keagamaan”, proses awalnya hadir sebagai pemahaman dan kemauan elite-elite ormas/orsospol yang bercorak personal kemudian dihadirkan dalam arti disosialisasi dan diinternalisasikan secara berkesinambungan kepada anggota atau simpatisan sehingga menjadi pemahaman dan kemauan kolektif (*collective wiliness*). Dari sinilah agama dan pemeluk agama sesuai dengan aliran keagamaannya menyatu dalam identitas ormas/orsospol. Kalau seseorang menyebut diri (identitas ormas orsospol-nya) misalnya, “saya adalah anggota FPI”,

maka di balik pernyataan itu hadir atau menghadirkan “pencitraan keagamaan” yang berbeda dan dibedakan dengan orang lain yang mengatakan lain seperti, “kalau saya orang NU”. Penyebutan “FPI” atau “NU” tadi, tidak semata-mata sebagai nama atau label ormas keagamaan, tetapi bersamaan dengan itu juga menghadirkan “realitas baru” yaitu pencitraan yang berbeda mengenai “agama dan kewajiban keagamaan” antar keduanya.

Dalam konteks Indonesia atau lebih spesifik Jawa Tengah, ciri-ciri dan radikalisme bisa dilihat dari beberapa indikator berikut. **Pertama**, bertitik tolak pada kesepakatan nasional yaitu dasar negara adalah Pancasila. Ini berarti, kekuatan apapun seperti perseorangan, ormas, maupun orsospol, yang menginginkan perubahan dasar negara menjadi negara Islam, merupakan indikasi munculnya radikalisme di dalam diri atau kelompok itu. Pada tataran ini, radikalisme tentu tidak harus dipandang negatif sepanjang tidak terjadi pemaksaan kehendak. **Kedua**, munculnya semangat yang kuat untuk mengganti hukum-hukum formal dengan memberlakukan hukum atau syari’at Islam bagi warga bangsa. **Ketiga**, adanya tindakan yang terorganisir untuk melarang, menghentikan, atau menghancurkan berbagai kegiatan-kegiatan *amusement* secara sepihak dengan menganggapnya sebagai kemaksiatan tanpa perlu koordinasi kepada aparat atau penegak hukum yang ada. **Keempat**, berkecenderungan melakukan kekerasan terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan. **Kelima**, keseluruhan tindakan kekerasan itu mereka justifikasi atau klaim sebagai perintah agama.

Persoalan radikalisme keagamaan memang merupakan persoalan yang kompleks karena hal tersebut mencakup berbagai dimensi kehidupan seperti keyakinan, interpretasi ajaran, hubungan

personal dan kemasyarakatan serta yang lainnya. Faktor lain terkait dengan tingkat pendidikan umat, lingkungan sosial dan pemahaman terhadap setiap perubahan. Berdasarkan pada temuan-temuan lapangan, benih-benih radikalisme sebetulnya sudah mulai muncul baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Hanya saja bagaimana mewujudkan keinginan demikian, dari sinilah sebetulnya gradasi radikalitas bisa dikenali.

Pertama, radikalisme ideologis. Radikalisme ideologis adalah suatu pandangan bahkan isme yang meyakini bahwa hukum Islam merupakan pilihan yang tidak bisa ditawar. dalam radikalisme ideologis ini terbagi lagi menjadi beberapa kategori yaitu: (a) radikalisme personal; (b) radikalisme kelompok, dan (c) radikalisme kelembagaan.

Radikalisme personal adalah sikap-sikap dan pandangan-pandangan yang lahir dari individu-individu lintas ormas dan lintas orsospol terhadap arti pentingnya hukum Islam ditegakkan di bumi Indonesia, terutama kepada segenap umat Islam di Indonesia sendiri. Tetapi karena coraknya personal maka keinginan seperti itu tidak terakumulasi menjadi kekuatan suatu gerakan. Radikalisme yang kemudian menjadi gerakan, biasanya muncul dalam suatu pengelompokan yang terakomodasi oleh ormas-ormas kepemudaan seperti Hizbut Tahrir, KAMMI dan berbagai organisasi yang lahir di Kampus.

Sedang radikalisme yang bergerak secara kelembagaan adalah radikalisme yang diusung oleh partai politik seperti PKS, dan partai-partai lain yang berazaskan Islam. Para politisi PKS itu secara sadar ingin mengusung bukan saja nilai-nilai ke-Islaman tetapi juga syari’at Islam untuk dijadikan alternatif pilihan terhadap realitas yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

Kedua, radikalisme yang sudah bersifat gerakan. Corak dari radikalisme

ini, telah diwujudkan ke dalam berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi lewat pendidikan, demonstrasi-demonstrasi, sampai pada tuntutan kepada pemerintah (baik eksekutif maupun legislatif) agar memberlakukan hukum Islam, dalam satu segi, dan menuntut dibubarkannya berbagai sarang kemaksiatan seperti lokasi pelacuran dan perjudian, dalam segi yang lain. Bahkan untuk mewujudkan keinginannya itu, kelompok ini telah melakukan tindakan pembubaran berbagai sarang kemaksiatan. Di antara kelompok ini yang paling menonjol adalah lasykar jihad, FPI, dan Jamiyah Islamiyah.

Lahan Subur Pertumbuhan Radikalisme

Radikalisme politik keagamaan mudah tumbuh dalam berbagai kondisi sebagai berikut: **Pertama**, kondisi di mana ruang-ruang untuk lahirnya sikap kritis dan peluang untuk mengkritisi keadaan baik untuk lingkup sosial maupun pemerintahan/negara terbuka lebar. Kampus terutama kampus-kampus (dari pendidikan umum) merupakan lahan yang paling mudah timbulnya kelompok maupun gerakan radikalisme ini. Organisasi keagamaan seperti Hizbut Tahrir merupakan contoh bagaimana gejala radikalisme keagamaan lahir di kampus-kampus.

Kedua, dalam situasi di mana kesenjangan sosial politik dan ekonomi telah menggejala secara meluas, sebagai akibat dari pemerintahan yang korup dan tidak adil, sehingga menumbuhkan perasaan frustrasi di antara kaum terpelajar dan aktivis keagamaan terhadap keadaan itu. Dalam kondisi seperti ini, mereka akan dengan mudah terbawa kepada kebutuhan perubahan dan sekaligus tumbuh romantisme kepada terwujudnya suatu negara yang aman, makmur dan sejahtera karena warga masyarakatnya sudah terampuni segala dosa-dosanya (*baladun toyyibatun wa robbun ghofur*).

Ketiga, ketika tumbuh ketidakpercayaan kepada tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, dan orsospol yang membawa-bawa nama agama tetapi di dalam tindakannya dianggap telah menyimpang jauh dari spirit dan moralitas Islam. Akibatnya, memunculkan adanya pemikiran alternatif yang bisa diusung oleh kelompok idealis. Berkumpulnya kaum idealis ini memungkinkan terakomodasinya pemikiran dan gerakan radikal dalam rangka mengembalikan spirit keagamaan baru.

Indikasi kemunculan Radikalisme

Bisa dilihat dari beberapa indikator kesepakatan nasional yaitu dasar negara adalah Pancasila. Ada yang menginginkan perubahan dasar negara menjadi negara Islam, merupakan indikasi munculnya radikalisme di dalam diri atau kelompok itu. Pada tataran ini, radikalisme tentu tidak harus dipandang negatif sepanjang tidak terjadi pemaksaan kehendak. Disamping itu munculnya semangat yang kuat untuk mengganti hukum-hukum formal dengan memberlakukan hukum atau syari'at Islam bagi warga bangsa. Kemudian adanya tindakan yang terorganisir untuk melarang, menghentikan, atau menghancurkan berbagai kegiatan-kegiatan *amusement* secara sepihak dengan menganggapnya sebagai kemaksiatan tanpa perlu koordinasi kepada aparat atau penegak hukum yang ada dan berkecenderungan melakukan kekerasan terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan. Keseluruhan tindakan kekerasan itu mereka justifikasi atau klaim sebagai perintah agama.

Pembahasan

Terdapat dua hal mengapa di berbagai daerah penelitian ditemukan beberapa kelompok organisasi sosial keagamaan maupun partai politik yang merupakan lahan subur untuk tumbuhnya

radikalisme politik keagamaan. Watak radikal atau mempunyai potensi untuk menjadi radikal secara psikologis dapat dijelaskan dari dua hal. *Pertama*, radikalisme politik keagamaan mungkin sekali terjadi karena dorongan emosi yang kemudian melahirkan semangat keagamaan yang tidak terkontrol. *Kedua*, Karena adanya konflik nilai.

Emosi lahir karena seseorang memiliki penilaian atau persepsi atas sesuatu yang terkait dengan kebutuhan, keinginan dan ekspektasi manusia (Wilson, 1992: 2-3). misalnya ada dua orang pada saat yang bersamaan dan mendengarkan rekaman pembacaan naskah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Bung Karno di stasiun TV. Seorang diantara mereka adalah pelaku dan terlibat langsung dalam proses kemerdekaan dan bahkan banyak melakukan perang gerilya melawan kolonial belanda. Sementara yang satunya tidak. Sudah dapat dipastikan emosi yang lahir dari keduanya akan sangat berbeda. Meskipun keduanya sama-sama memiliki akses terhadap event yang sama, ekspektasi mereka jelas akan berbeda.

Mengapa ekspektasi mereka berbeda? Jawabnya adalah karena persepsi dipengaruhi oleh struktur kognisi yang telah ada sebelumnya, yakni suatu pengalaman. Pengalaman inilah yang kemudian membentuk model, cara atau sekema (Wilson: 1992:2).

Satu hal yang menarik untuk dikaji adalah kenyataan bahwa kebanyakan ormas keagamaan yang memiliki tingkat emosi dan sentimen keagamaan tinggi justru banyak diminati oleh mereka yang latar belakang pendidikannya bukan dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi keagamaan seperti IAIN atau STAIN. Hampir semua informan yang tergabung dalam ormas keagamaan maupun partai politik berasal dari perguruan tinggi

umum. Mengapa demikian?, kerana agama yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti IAIN, tidak hanya pemahaman agama berdasarkan pendekatan normative-teologis tetapi melibatkan banyak pendekatan rasional dengan bantuan ilmu-ilmu sosial dan humaniora sebagai pisau analisisnya. Dengan demikian aspek normatifitas dari suatu ajaran, baik yang menyangkut doktrin, ritus, maupun keyakinan keagamaan, akan selalu diimbangi dengan kajian aspek historisnya. Pendalaman pengkajian pada aspek historisitas inilah yang membawa pada relativisme ajaran. Pada saat yang bersamaan, kecenderungan untuk melakukan pemutlakan terhadap hasil penafsiran menjadi dapat dihindari. Keadaan ini, sudah barang tentu akan berakibat pada keterbukaan sikap untuk menerima kebenaran dari hasil penafsiran yang dilakukan orang lain.

Kondisi sebagaimana terurai diatas, diikuti lagi oleh referensi bacaan. Ketika kesadaran untuk mempelajari agama semakin tumbuh, buku-buku yang dibaca adalah hasil karya para sarjana muslim kontemporer yang “berhaluan keras” seperti buku-buku karya al-Maududi (pendiri jamaa’at al-Islami dari Pakistan), Hasan al-Banna (pendiri Ikhwanul al-Muslimun dari Mesir), Muhammad Qutb, Sayyid Qutb, Abdul Qadir ‘Audah, Muhammad S. El-Hawa, al-Nabhani dan pengarang-pengarang lain yang serupa.

Pertanyaan yang patut diajukan kemudian ialah, mengapa karya-karya mereka lebih menarik dari karya-karya sarjana muslim kontemporer yang banyak menawarkan model pembaharuan pendekatan Studi Islam, seperti Fazlurrahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Sa’id Asmawi, Muhammad Syahrur, Abid al-Jabiri, dan Hasan Hanafi? Ada beberapa yang dapat dikemukakan disini:

Pertama, model pemahaman keagamaan yang ditawarkan oleh para pengarang beraliran keras pada umumnya mudah difahami. Bagi yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup, jelas hal ini akan sangat menarik. Tidak banyak alternatif model pemahaman yang disertai tingkat analisis filosofis. Demarkasinya jelas, kalau tidak hitam ya putih. daerah abu-abu yang biasanya nampak pada model-model pendekatan dengan analisis ilmu-ilmu sosial dan humaniora, tidak begitu nampak pada karya-karya mereka.

Kedua, dalam mengungkapkan sejarah masa lalu pada umumnya bersifat romantis. Banyak hal yang terjadi pada masa-masa awal Islam yang perlu dikritisi lepas dari pandangan mereka.

Ketiga, anti Barat sangat menonjol. Kenyataan bahwa Barat telah membuat stigma kemanusiaan, baik masa lalu dengan melakukan penjajahan di hampir semua negara Islam maupun pada masa sekarang yang ditandai dengan kelonggaran nilai-nilai moral. Karena faktor-faktor seperti itulah menyebabkan penolakan total terhadap model pendekatan Islam yang dikembangkan di Barat. Bahkan tidak jarang mereka mengecam para sarjana muslim yang belajar Islam di Barat dengan tuduhan antek-antek Barat.

Kenyataan menunjukkan memang ada beberapa orientalis yang tidak obyektif dalam melakukan kajian Islam, tetapi tidak lalu berarti semua orientalis tidak bisa obyektif. Masih banyak juga di antara para orientalis yang memilih model pengembangan studi Islam dengan cara-cara ilmiah. Komitmen mereka terhadap keilmuan jauh melebihi komitmen terhadap agamanya. Lain dari itu, apa yang dilakukan oleh sarjana muslim kontemporer terhadap tradisi keilmuan Barat sebenarnya tidak sampai pada penggantian secara total model pendekatan yang selama ini telah menjadi *mainstream*

dalam tradisi keilmuan di dunia Islam. Yang lebih nampak justru mereka telah melakukan dialog dengan tradisi akademik Barat. Kalau ini yang dilakukan, Islam pada masa lalu pun telah melakukannya. Kemajuan Islam pada abad-abad awal dan pertengahan justru merupakan buah yang dihasilkan dari dialog antara Islam dengan tradisi Hellenisme atau Yunani.

Banyak karya-karya mereka yang menawarkan alternatif dalam memecahkan masalah-masalah krisis kemanusiaan modern dan degradasi moral yang melanda masyarakat dan negara-negara Islam. Banyak buku-buku yang mereka tulis mengecam Barat sebagai yang bertanggungjawab atas runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Kapitalisme yang saat sekarang sudah mengglobal bukannya menjadikan manusia semakin sejahtera secara ekonomis tetapi telah membuat kesenjangan yang dahsyat antara miskin dan kaya. HAM dan demokrasi telah memberikan hak-hak individual yang luar biasa, sehingga negara tidak lagi memiliki kebebasan untuk melakukan intervensi ketika terjadi degradasi moral yang dilakukan secara individual. Kenyataan inilah yang kemudian semakin mempertajam keyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya alternatif setelah dunia ditinggalkan Uni Soviet. Akan tetapi memang perlu disesalkan mengapa kebanyakan buku-buku tersebut hanya menawarkan solusi untuk memecahkan masalah kemanusiaan tetapi tidak menawarkan banyak pilihan dalam memilih solusi tersebut.

Karakter itulah yang banyak mewarnai buku-buku yang pada umumnya menjadi rujukan dalam memahami Islam. Sudah pasti siapapun yang larut dalam pemahaman keagamaan sebagaimana ditawarkan oleh karya-karya seperti tersebut diatas, maka *world view* yang dimilikinya akan berbeda pula. *World view* inilah yang oleh Wilson disebut dengan

pre-existing knowledge yang akan sangat menentukan persepsi dan penilaian terhadap apa saja, termasuk orang lain atau kelompok lain di luar dirinya.

Persepsi dan penilaian yang mereka miliki berbeda dengan kebanyakan muslim di Indonesia, maka ekspektasi mereka terhadap negara dan system politik, budaya lokal dan sebagainya akan berbeda pula. Dalam analisis Wilson, sebagaimana dikemukakan di atas, ekspektasi akan menentukan tingkat emosi. Karenanya jika ekspektasi mereka tidak terpenuhi, maka yang nampak adalah watak emosional. Semakin tinggi ekspektasi seseorang semakin emosional perilaku orang tersebut, dan akhirnya semakin radikal. Karenanya secara psikologis dapat dipahami mengapa mereka mudah tersinggung, emosional dan radikal ketika menghadapi kenyataan politik sekarang ini.

Hasil Penelitian di lapangan, faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya radikalisme politik keagamaan memang ada. Misalnya berbagai macam kelompok sosial keagamaan yang ada di Surakarta hampir sepakat bahwa menegakkan Syari'at Islam itu merupakan suatu kewajiban agama. Front Pembela Islam Surakarta (FPIS) bahkan mewajibkan semua anggota yang tergabung dalam kelompok ini wajib menjalankan semua yang diperintahkan Al Qur'an dan Sunnah Nabi termasuk jihad. Bila terjadi pelanggaran maka para anggota akan diadili dalam Majelis Syari'at. Bahkan secara eksplisit, FPIS memiliki ekspektasi terwujudnya masyarakat Indonesia adil dan makmur yang berlandaskan syari'at Islam.

Sama seperti FPIS, adalah lasykar Hizbullah Sunan Bonang. Ekspektasinya adalah menegakkan syari'at Islam dengan cara membentuk *Imamah*. Karenanya, usaha mereka begitu keras untuk mencetak kader-kader agar masyarakat Islami tetap

terbentuk. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) juga memiliki kesamaan visi dengan FPIS maupun Laskar Hizbullah), yang membedakannya adalah keanggotaan KAMMI berasal dari mahasiswa yang kebanyakan belajar di perguruan tinggi umum. Di samping itu, KAMMI nampaknya lebih realistis dalam menghadapi hambatan (*barrier*). Mereka menyadari bahwa hambatan untuk menegakkan syari'at di Indonesia terlalu kuat sehingga kegiatan yang dipilih tidak berupa latihan perang, tetapi dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menawarkan apa yang dibutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Apa yang mereka harapkan jelas sekali yakni tegaknya syari'at Islam karena bagi mereka hal ini merupakan kewajiban keagamaan. Dengan demikian ada ekspektasi yang berlebihan untuk meraih sesuatu padahal situasi tidak memungkinkan. Karenanya, dapat dimaklumi jika watak mereka sangat emosional saat menghadapi degradasi moral dan kemaksiatan yang semakin melanda masyarakat. Pengrusakan tempat-tempat maksiat yang terkadang dilakukan di luar batas otoritas organisasi kemasyarakatan, sering dilakukan karena dorongan emosi yang meluap, sementara pada saat yang sama pihak yang berwajib seringkali membiarkannya.

Berbeda dengan FPIS, luapan emosi keagamaan yang ada pada kelompok KAMMI tidak diwujudkan dalam sikap agresif. Kenyataan bahwa hambatan politis yang dihadapi terlalu besar, disertai dengan kesadaran inefektifitas gerakan-gerakan fisik yang agresif dan radikal untuk suatu perubahan masyarakat, maka pengendalian emosi diwujudkan dalam cara yang damai. Upaya yang dilakukan adalah gerakan penyadaran kepada masyarakat, khususnya kelompok anak-anak muda di kampus.

Gerakan ini secara politis membuahkan hasil gemilang, terbukti dengan naiknya suara peroleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah menggunakan KAMMI sebagai sayap politik untuk kalangan mahasiswa pada Pemilu legislatif 2004.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil pelajaran (*lesson learn*) bahwa pemahaman terhadap agama Islam telah melahirkan ekspektasi tentang masyarakat, hukum dan sistem politik dan lainnya. Tingkat ekspektasi ini, dengan demikian, dipengaruhi oleh cara bagaimana seseorang memahami agama. Jika memahami agama hanya dengan cara-cara yang literal-tekstual, maka ekspektasinya pun akan sejalan dengan kandungan makna literalnya. Karena ekspektasi seseorang akan mempengaruhi tingkat emosinya, maka tingkat emosi saat menghadapi situasi sosial politik pun akan dipengaruhi oleh model pemahaman keagamaannya. Jadi model pemahaman keagamaan sangat mempengaruhi tingkat emosi seseorang. Jika model pemahaman keagamaan dilakukan secara tekstual maka tingkat emosi keagamaannya pun akan seperti kandungan makna literalnya. Untuk memecah emosi keagamaan agar tidak menjadi agresif maka perlu diberikan alternatif model pemahaman lainnya sehingga kebenaran agama tidak difahami sebagai sesuatu yang monolitik. Karena di perguruan tinggi non keagamaan pada umumnya pendekatan keagamaan dilakukan dengan cara yang monolitik, maka sangat wajar jika potensi radikalisme politik keagamaan muncul dari perguruan tinggi umum. Atau dengan kata lain perguruan tinggi umum adalah lahan yang subur dan potensial bagi tumbuhnya radikalisme politik keagamaan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian bahwa hampir semua pengurus ormas keagamaan Islam yang radikal atau memiliki potensi radikal berasal dari perguruan tinggi umum.

Dalam konteks Indonesia atau lebih spesifik Jawa Tengah, ciri-ciri dan radikalisme bisa dilihat dari beberapa indikator berikut. **Pertama**, bertitik tolak pada kesepakatan nasional yaitu dasar negara adalah Pancasila. Ini berarti, kekuatan apapun seperti perseorangan, ormas, maupun orsospol, yang menginginkan perubahan dasar negara menjadi negara Islam, merupakan indikasi munculnya radikalisme di dalam diri atau kelompok itu. Pada tataran ini, radikalisme tentu tidak harus dipandang negatif sepanjang tidak terjadi pemaksaan kehendak. **Kedua**, munculnya semangat yang kuat untuk mengganti hukum-hukum formal dengan memberlakukan hukum atau syari'at Islam bagi warga bangsa. **Ketiga**, adanya tindakan yang terorganisir untuk melarang, menghentikan, atau menghancurkan berbagai kegiatan-kegiatan *amusement* secara sepihak dengan menganggapnya sebagai kemaksiatan tanpa perlu koordinasi kepada aparat atau penegak hukum yang ada. **Keempat**, berkecenderungan melakukan kekerasan terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan. **Kelima**, keseluruhan tindakan kekerasan itu mereka justifikasi atau klaim sebagai perintah agama.

Radikalisme politik keagamaan mudah tumbuh dalam berbagai kondisi. Mulai kondisi di mana ruang-ruang untuk lahirnya sikap kritis dan peluang untuk mengkritisi keadaan baik untuk lingkup sosial maupun pemerintahan/negara terbuka lebar. Kampus terutama kampus-kampus (dari pendidikan umum) merupakan lahan yang paling mudah timbulnya kelompok maupun gerakan radikalisme ini. Organisasi keagamaan seperti Hizbut Tahrir merupakan contoh bagaimana gejala radikalisme keagamaan lahir di kampus-kampus.

Adanya kesenjangan sosial politik dan ekonomi telah menggejala secara

meluas, sebagai akibat dari pemerintahan yang korup dan tidak adil, sehingga menumbuhkan perasaan frustrasi di antara kaum terpelajar dan aktivis keagamaan terhadap keadaan itu. Mendorong tumbuh romantisme kepada terwujudnya suatu negara yang aman, makmur dan sejahtera karena warga masyarakatnya sudah terampunise segala dosa-dosanya (*baldatun toyyibatun wa robbun ghofur*) dan ketika tumbuh ketidakpercayaan kepada tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, dan orsospol yang membawa-bawa nama agama tetapi di dalam tindakannya dianggap telah menyimpang jauh dari spirit dan moralitas Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Munculnya ideologi-ideologi dan gerakan-gerakan radikalisme hampir selalu ditandai oleh (a) suatu keadaan yang semakin jauh dari kondisi yang diidealkan menurut faham keagamaan; (b) tersumbatnya komunikasi antara kelompok-kelompok pengambil keputusan (penguasa) dengan kelompok-kelompok kritis karena masing-masing di antara mereka sudah tertanam perasaan kecurigaan, kekhawatiran, dan ancaman; dan (c) melunturkan kewibawaan terutama tokoh-tokoh agama karena sikap dan tindakan yang lebih berpihak kepada penguasa, sehingga generasi muda mulai kehilangan kepercayaan dalam satu segi dan keinginan untuk mengekspresikan perasaan tidak puas secara kolektif sambil mengharapkan tumbuhnya semangat baru

Islam dalam segi yang lain. Dari ketiga faktor itu maka langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mengeliminasi politik keagamaan, bisa ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut. **Pertama**, perlunya ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum lemah, sekaligus perlakuan yang adil bagi setiap warga di muka hukum. Dengan tumbuhnya kehidupan yang lebih baik, menjadikan kelompok-kelompok kritis akan merespon secara reaktif dengan mengedepankan pemikiran dan gerakan radikal lewat payung agama secara subyektif.

Kedua, jika kelahiran radikalisme disebabkan antara lain oleh tersumbatnya komunikasi maka pemerintah harus mulai terbuka dan membuka diri untuk dapat terjadinya komunikasi guna memecahkan persoalan kebangsaan secara partisipatif.

Ketiga, para tokoh agama harus mulai memberi contoh yang baik dan konsisten, sehingga mereka terutama kaum muda tumbuh kepercayaan lagi untuk mengikuti jejaknya atau mendiskusikan berbagai problema kehidupan sosial keagamaan secara arif.

Keempat, perlunya penyadaran kepada mereka yang mempunyai ideologi dan gerakan radikal untuk diajak berfikir bersama, mengenai keuntungan dan resiko kalau di Indonesia ini diberlakukan hukum islam sementara masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari penganut agama yang berbeda-beda. Tentu intinya, penyadaran terhadap bahayanya “dominasi mayoritas, tirani minoritas”.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhori, Mochtar, 1986, "Radikalisme Agama – Sebuah catatan Awal" dalam pesantren, No. 4/Vol. III. Hal 55-69
- Burrel, RM, ed, 1995, *Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ofsett (Terjemahan)
- Effendi, Bahtiar dan Sirry, Mun'nin A, 2003, Ekstremisme islam: Bukan Sekedar Persoalan Teologis atau Penafsiran Kegamaan" dalam Jurnal Demokrasi & Ham. Vol. 3 No. 1, Januari – April. Hal 105 - 121
- Priyono,AE.2003. *Fenomena Terortsme Agarna dan Kebangkitan Neo Demokrasi & Ham*, Vol.3 No. I Januari - April. Halaman 6-34.
- Suparlan,Parsudi.1999.*Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya*, dalam Antropologi Indonesia, Tahun XXVI, No. 59, Mei-Agustus, halaman 7-19.
- The American College Dictionary* (1961: 998)